

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Alexander Sirait, R., & Resti Pratiwi, D. (2021). *PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA & CATATAN KRITIS ATAS KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021 PEREKONOMIAN GLOBAL*. 6–11.

Desniarti. (2016). *Modifikasi Model Pertumbuhan Ekonomi Solow dengan Model Pertumbuhan Von Bertalanffy*. Universitas Sumatera Utara.

Emami, M., Rayegan, E., Parveizi, M., & Nazari, K. (2012). *Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards*. 3(9). https://www.researchgate.net/publication/233955033_Government_Accounting_An_Assessment_of_Theory_Purposes_and_Standards

Murialti, N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Dengan Regresi Data Panel Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2), 252–260. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2344>

Pratasari, Y., & Syarifah, S. (2014). *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual*.

Rimadewi, N. (2016). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai Amanat Undang-undang*. <https://jabar.bpk.go.id/files/2016/05/Penerapan-SAP-Basis-Akrual-Amanat-UU.pdf>

Buku, modul instansi, dan perkuliahan

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI. (n.d.). *Penyertaan Modal Negara kepada BUMN*. Retrieved April 19, 2022, from <http://www.bumn.go.id/data/uploads/files/Proyeksi%202014/files/assets/common/downloads/publication.p>

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan. (2022). *Unit Expose - Dit. KND*. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*.

Tim Dosen PKN STAN. (2021). *Lecture 11 Akuntansi Pembiayaan*. PKN STAN.

Peraturan perundang-undangan dan dokumen publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021*.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang *Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang *Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera*.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2021 tentang *Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara*. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2018 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara*. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2020 tentang *Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih*.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang *Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar*.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang *Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, (2013).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2016). *Standar Akuntansi Pemerintahan Revisi 2016*.

Kementerian Keuangan RI. (2020). *Nota Keuangan Beserta APBN TA 2021*.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). *Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2020 Audited*.

Website remi dan berita

Antara. (2020, July 15). *Hutama Karya: PMN Rp 3,5 Triliun untuk 2 Ruas Tol Trans Sumatera*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1365259/hutama-karya-pmn-rp-35-triliun-untuk-2-ruas-tol-trans-sumatera/full&view=ok>

Avisena, M. I. R. (2022, April 30). *Hutama Karya Dapat Guyuran Uang Negara Rp49,05 Triliun*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/445444/hutama-karya-dapat-guyuran-uang-negara-rp4905-triliun>

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi) (Milyar Rupiah), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html>

Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. (2021, February 25). *Pidato Kunci Presiden Jokowi pada Pembukaan Kegiatan CNBC Indonesia Economic*. Sekretariat Presiden. <https://www.youtube.com/watch?v=xySPeOHp4RE>

BPK RI. (2013). *WAKIL KETUA BPK: MODAL BUMN MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA*. <https://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-modal-bumn-merupakan-kekayaan-negara>

DPR RI. (2021, July 12). *Banggar DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI*. DPR RI Official. https://www.youtube.com/watch?v=YFZsW_s82f8&list=LL&index=42&t=51s

Hanifah, R. W. A. (2022, February 4). *Hutama Karya Dapat Bantuan Rp25,2 Triliun dari PMN*. Alinea.Id. <https://www.alinea.id/bisnis/hutama-karya-dapat-bantuan-rp25-2-triliun-dari-pmn-b2feL9Beh>

- Hutama Karya. (2021, September 10). *HK Academy: Accelerating Indonesia's Economic Growth Through Infrastructure Development*. Official YouTube Hutama Karya. <https://www.youtube.com/watch?v=1uSpG7BAdk&t=11848s>
- Kementerian Perdagangan. (2022). *Neraca Perdagangan Indonesia Total*. Satudata Perdagangan. <https://satudata.kemendag.go.id/indonesia-trade-balance>
- Komisi XI DPR RI. (2021, November 8). *Live Streaming - Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI*. Komisi XI DPR RI Channel. <https://www.youtube.com/watch?v=UHB-9pH1k-o&t=2077s>
- Logaritma, S. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha. In *Badan Pusat Statistik*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2022/04/05/aec064ce0205363edd1d58c/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html>
- Ministry of Finance Republic of Indonesia. (2022, January 3). *Konferensi Pers: Realisasi (Sementara) Pelaksanaan APBN 2021*. Official YouTube Kemenkeu RI. <https://www.youtube.com/watch?v=EdG3G3Rz1eg>
- Nainggolan, E. U. P. (2020, July 15). *Sejarah Panjang Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13257/Sejarah-Panjang-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Indonesia.html>
- Novelino, A. (2021, February 8). *BUMN Dapat Suntikan Rp42,3 T, PLN dan Pertamina Dapat Aset*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210208161635-532-603752/bumn-dapat-suntikan-rp423-t-pln-dan-pertamina-dapat-aset>
- PT Sarana Multi Infrastruktur. (2021, August 22). *Medbrief DJKN : Manfaat Sosial dan Ekonomi Pembangunan Tol Trans Sumatera*. Official YouTube DJKN Kemenkeu. <https://www.youtube.com/watch?v=hYwuxoUK4rU&t=391s>
- Puspasari, R. (2021, October 25). Kerja Keras APBN Semakin Nyata Seiring Momentum Pemulihan Ekonomi yang Merata. *APBN KiTa Oktober 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kerja-keras-apbn-semakin-nyata-seiring-momentum-pemulihan-ekonomi-yang-merata/>
- Putri, C. A. (2020, December 29). *RI Butuh Investasi Rp 5.900 Demi Target PDB 4,5%-5,5% di 2021*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201229104249-4-212156/ri-butuh-investasi-rp-5900-demi-target-pdb-45-55-di-2021>

Sekretariat Presiden. (2021, May 27). *LIVE: Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021*. Sekretariat Presiden. <https://www.youtube.com/watch?v=KuV3hjkOzrc>

Wardana, R. (2020, November 4). *Pengertian Neraca Perdagangan dan Surplus VS Defisit*. <https://lifepal.co.id/media/neraca-perdagangan/>

Yasa, A. (2020, May 27). *Terima PMN Rp11 Triliun, Hutama Karya Kebut Bangun Tol Trans-Sumatra*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200527/45/1245400/terima-pmn-rp11-triliun-hutama-karya-kebut-bangun-tol-trans-sumatra>